

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, G. 2017. Interaksi Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah. *Tesis*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Afrakhteh, H. 2006. The Problems of Regional Development and Border Cities: A Case Study of Zahedan, Iran. *Cities*, 23(06): 423-432.
- Alfiansyah, H., dan Budyanra. 2019. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*, (01): 424-429.
- Ananda, S. N., Indrawati, L. R., dan Septiani, Y. 2020. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kependudukan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018. *DINAMIC*, 2(03): 743-755.
- Antara, I. G. M. Y., dan Suryana, I. G. P. E. 2020. Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Media Komunikasi Geografi*, 21(01): 63-73.
- Anwar, K., dan Fatmawati. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif, Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(01): 15-22.
- Backe, D., Syahza, A., dan Asmit, B. 2018. Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1: 182-189.
- Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS.
- Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penulis: Jakarta. Diakses 5 Juli 2023 dari https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf.

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Analisis Profil Penduduk Indonesia Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2021*. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2022. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Basrowi dan Juariyah, S. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(01): 58–81.
- Becker, G. S. 1964. *Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Birotapem Setda DIY. 2020. *Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*. Yogyakarta: Birotapem Setda DIY.
- Budianta, A. 2010. Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8(01): 72–82.
- Bupati Gunung Kidul. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2021–2026. Penulis: Wonosari. Diakses 14 Juni 2023 dari <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2021/08/rpjmd-kabupaten-gunungkidul-tahun-2021-2026/>.
- Bupati Kulon Progo. 2017. Peraturan Daerah Kulon Progo nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022. Penulis: Wates. Diakses 14 Juni 2023 dari <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/4895/rpjmd-kabupaten-kulon-progo>.
- Bupati Kulon Progo. 2022. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Penulis: Wates. Diakses 12 Juli 2023 dari
<https://bappeda.kulonprogokab.go.id/detil/890/rpd-kabupaten-kulon-progo-tahun-2023-2026>.

Bupati Sleman. 2021. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026. Penulis: Sleman. Diakses 12 Juli 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/184402/perda-kab-sleman-no-3-tahun-2021>.

Cattaneo, A., Adukia, A., Brown, D., dkk. 2022. Economics and Social Development Along The Urban-Rural Continuum: New Opportunities to Inform Policy. *World Development*, 157.

Disdukcapil Kabupaten Sleman. 2019. *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman*. Sleman: Disdukcapil Kabupaten Sleman

Dukcapil Gunung Kidul. 2014. Profil Perkembangan Kependudukan Pilihan Tepat Dasar Pembangunan Berkelanjutan. Diakses 9 November 2022 dari <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2014/04/02/membaca-penyajian-profil-perkembangan-kependudukan-akan-membuat-tepat-pilihan-dalam-pembangunan-berkelanjutan/>.

Dukcapil Kalbar. 2022. Data Kependudukan Sebagai Modal Dasar Pembangunan Daerah. Diakses 9 November 2022 pukul 19.30 WIB dari <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/data-kependudukan-sebagai-modal-dasar-pembangunan-daerah>.

Fathoni, R., dan Syarifudin, D. 2014. Analisis Tipologi Wilayah sebagai Arahan untuk Kebijakan Penyerasian Pengembangan Wilayah. *Jurnal Planologi*, 1(01): 59–74.

Fitriani, I. N., dan Indrayati, J. A. 2018. Fenomena Urban Sprawl Jabodetabek. *Edu Geography*, 6(01): 53–61.

Fordian, D., Dai, R., dan Sitio, N. 2020. Penyusunan Profil Desa Citaratu Berbasis Demografi Pekerjaan, Pendapatan dan Sumber Penghidupan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01): 6–9.

- Gould, W. T. S. 2009. *Population and Development Routledge Perspectives on Development*. London: Routledge.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Penulis. Diakses 15 November 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146530/perda-no-3-tahun-2020>.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur DIY Nomor 17 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Penulis: Yogyakarta. Diakses 10 Juli 2023 dari https://jdih.jogjaprov.go.id/storage/17368_2022pg0034017.pdf.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Penulis: Yogyakarta. Diakses 14 Juni 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249142/pergub-no-15-tahun-2023>.
- Hanifah, N., dan Buchori, I. 2023. Peran sektor ekonomi dan kependudukan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(01): 225–240.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hardati, P. 2013. Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Lapangan Pekerjaan di Jawa Tengah. *Forum Ilmu Sosial*, 40(02): 219–229.
- Hardati, P., Rijanta, R., dan Ritohardoyo, S. 2014. Struktur Mata Pencaharian Penduduk dan Diversifikasi Perdesaan di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang. *Jurnal Geografi*, 11(01): 84–95.
- Hardiani dan Junaidi. 2011. Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal Dasar dan Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. *Laporan Penelitian*, BKKBN dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Jambi.

Diakses 6 Oktober pukul 23.00 WIB dari

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fRDPTWsAAAAJ&citation_for_view=fRDPTWsAAAAJ:1fn0f_u3g34.

- Hariyadi, A. R. 2021. Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(02): 259–276.
- Harmadi, S. H. B. 2016. *Analisis Data Demografi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hasto. 1988. *Analisis Kependudukan*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial.
- Indriani, M. 2016. Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Gema Keadilan*, 3(01): 67–77.
- Johnston, W. R. 2017. Assessing the Benefit of a Rising Ride: Educational Attainment and Increases in Neighborhood Socioeconomic Advantage. *Social Science Research*, 62: 335–349.
- Junianto dan Lumbantoruan, W. 2013. Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Geografi*, 5(01): 149–156.
- Kholifaturrohman, R., Floresti, D. A., Mayasari, V., dan Rosiana, M. 2022. Kontribusi Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendidikan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 24 (04): 85–93.
- Kurnianingsih, N. A. 2013. Klasifikasi Tipologi Zona Perwilayahan Wilayah Peri-Urban di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(03): 251–264.
- Kurnianingsih, N. A., Pratami, M., dan Putri, M. B. 2021. Karakteristik Pertumbuhan Penduduk Perdesaan pada Perkembangan Wilayah Peri-urban di Perbatasan Kota Surakarta. *Journal of Science and Applicative Technology*, 5(01): 138–147.
- Kurniawan, A. 2005. Fungsi Daya Dukung Sumber Daya Alam Terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sleman. *Majalah Geografi Indonesia*, 19(02): 141–154.

- Kurniawati, E., dan Sugiyanto, C. 2021. Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(01): 41–58.
- Kuswantoro, U. A., dan Pramono, R, W, D. 2020. Peran Kota Wonosari Terhadap Perkembangan Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Penataan Ruang*, 15(01): 23–29.
- Lestari, T. A., dan Rijanta, R. 2018. Kajian Fungsi dan Peran Kota Wates sebagai Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi Terhadap Wilayah Hinterland. *Jurnal Bumi Indonesia*,
- Listyawati, A., dan Ayal, L. D. 2018. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan antar Negara: Kajian Masyarakat Kawasan Perbatasan di Timor Tengah Utara. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(01): 37–50.
- Lumbantoruan, E. P., dan Hidayat, P. 2014. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(02): 14–27.
- Mahadiansar, Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., dan Asparyana. 2020. Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(01): 77-92.
- Majida, F., dan Handayani, K. D. 2019. Tipologi Ketertinggalan Wilayah pada Kabupaten Sampang. *Jurnal Penataan Ruang*, 14(01): 24-27.
- Mantra, I. B. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhaeni, A. 2018. *Pengantar Kependudukan jilid 1*. Denpasar: Sastra Utama.
- Martanto R., dan Indriani, V. 2021. Arahana Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman, Indonesia. *Prosiding FIT ISI*, 1: 187–193.
- Menteri Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis: Jakarta. Diakses 14 Juni 2023 dari <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/permendagri/2964>.

- Menteri Dalam Negeri. 2012. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis: Jakarta. Diakses 14 Juni 2023 dari <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-15-tahun-2012>.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penulis: Jakarta. Diakses 4 Mei 2023 dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/PERMENDIKBUD%20NOMOR%201%20TAHUN%202021.pdf>.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Penulis: Yogyakarta. Diakses 10 Juli 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224242/permendikbud-no-22-tahun-2016>.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2007. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Penulis: Jakarta. Diakses dari <https://repositori.kemdikbud.go.id/18715/1/Permendiknas-No.-24-tahun-2007.pdf>.
- Muta'ali, L. 2014. *Pengembangan Wilayah Tertinggal*. Yogyakarta: BPFG.
- Nel, E. 2015. Recent trends in regional and local demographic and economic inequality in New Zealand and associated regional development implications. *Local Economy*, 30(01): 12-20.
- Novitasari, L. 2016. Kondisi Sosial Ekonomi Migran di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, *Geo Educasia*, 1(05).

- Noviyanti, D., Pravitasari, A. E., dan Sahara, S. 2020. Analisis Perkembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk Arah pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan. *Jurnal Geografi*, 12(01): 57-73.
- Nurlailiyah, A. 2019 Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(01): 13–21.
- Nurwati, N., dan Mulyana, N. 2017. Profil Penduduk Kabupaten Cianjur. *Social Work Jurnal*, 7(02): 1-79.
- Octavianingrum, D. 2015 Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi 5 Kabupaten/Kota. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pangarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., dkk. 2022. Studi Komparatif Ketimpangan antar Pulau di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(02): 288–298.
- Pemerintah Daerah DIY. 2022. Visi dan Misi. Diakses 17 Oktober 2022 pukul 10.00 dari <https://jogjaprov.go.id/p/visi-misi#:~:text=Visi%20%26%20Misi&text=Terwujudnya%20peningkatan%20harmoni%20kehidupan%20bersama,penyelenggaraan%20pemerintahan%20yang%20demokratis%2C%20dan>.
- Presiden Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan). Penulis: Jakarta. Diakses 19 September 2022 dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=Undang%2DUndang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945&text=Bahwa%20sesungguhnya%20Kemerdekaan%20itu%20ialah,sesuai%20dengan%20perikemanusiaan%20dan%20perikeadilan>.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,. Penulis: Jakarta. Diakses 12 Juni 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.

- Presiden Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. Penulis: Jakarta. Diakses 9 November 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulis: Jakarta. Diakses 9 November 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Presiden Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Penulis: Jakarta. Diakses 9 November 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5748>.
- Prihastuti, D. 2022. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(01): 29–41.
- Purnama, D. T., Chainar, C., dan Niko, N. 2021. Partisipasi Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Melanjutkan Pendidikan: Studi di Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas. *Jurnal Studi Sosial*, 6(02): 107–118.
- Purwoto, A. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ragil, C. 2018. Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/ Kota Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XIII Tahun 2018 (ReTII)*, 350–356.
- Raharti, R., Sarnowo, H., dan Aprilia, L. A. 2020. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6 (01): 36–53.
- Rahayu, P., Rini, E. F., Andini, I., dan Putri, R. A. 2021. Indikator Ketimpangan dalam Pembangunan dan Penyebaran Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(02): 231–244.

- Ridho, M., Zulgani, dan Achmad, E. 2022. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(01): 47–58.
- Riyadi dan Ghuzini, D. 2021. Ketimpangan pendidikan dan pendapatan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(02): 139–152.
- Romer, D. 2006. *Advanced Macroeconomics*. New York: McGraw Hill International Book Company.
- Rupita. 2019. Analisis Situasi Pendidikan di Wilayah Perbatasan Indonesia - Malaysia: Studi di Kecamatan Puring Kencana , Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. *Journal Community Development and Society*, 1: 11–19.
- Sa’ad, B. S. M., dan Santoso, E. B. 2015. Tipologi Kecamatan Tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Teknik ITS*, 4(02): 119–124.
- Sadali, M. I., Alfana, M. A. F., Hadijah, Rosewidiadari, E. L., dan Andika, R. 2022. Dominasi Kota sebagai Konsentrasi Fasilitas Kesehatan (Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta). *Region (Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif)*, 17(01): 136–150.
- Salim, E., Adioetomo, S., Nizam, Arifin, E., Pratama, A. 2015. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: UNFPA.
- Salim, A. 2018. Kemiskinan di Perkotaan Yogyakarta dan Signifikansinya dalam Penanggulangan Kemiskinan di DIY. *Jurnal Perencanaan*, 5: 1–12.
- Salsabila, N., dan Purwohandoyo, J. 2020. Pengaruh Perkembangan Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta terhadap Perkembangan Desa Wisata Tanjung, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16 (02): 91–101.
- Sambodo, H., Kadarwati, N., dan Windhani, K. 2022. Pengaruh Distribusi Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 24(04): 732–742.
- Schultz, T. W. 1961. Investment in human capital. *The American economic review*, 51(01): 1–17.

- Sen, A. 1999. *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Setyowati, A. F., dan Melati, I. S. 2020. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(3): 875–891.
- Simanjuntak, K. M. 2015. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(02): 111–130.
- Sirusa BPS. 2022. Rasio Jenis Kelamin. Diakses 19 September pukul 14.05 WIB dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/87>.
- Sontosudarmo, 1992. Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, :
- Suandi, Yuslidar, Suma, S., dan Damayanti, Y. 2014. Hubungan Karakteristik Kependudukan dengan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jambi. *Piramida*, 10(02): 71–77.
- Subkhi, W. B., dan Mardiansjah, F. H. 2019. Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(02): 105–120.
- Sudjito, A., dan Krisdyatmiko. 2017. Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: IRE.
- Suhartono. 2015. Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(01): 33–43.
- Sukamdi. 2020. *Kependudukan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Suparman, N. 2021. *Manajemen Pembangunan Wilayah*. Bandung: Fisip UIN SGD Press.
- Surapaty, S. C. 1990. Kependudukan: Menuju Suatu Ilmu Kemanusiaan Terpadu. *Jurnal Populasi*, 2(01): 1–10.
- Suryabrata, S. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Susanto, H. 2020. Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(01): 1–9.

- UNDP. 2018. Human Development Indices and Indication 2018 Statistical Update. Diakses 30 Juni 2023 dari https://hdr.undp.org/sites/default/files/data/2020/hdr2018_technical_notes.pdf.
- Walikota Yogyakarta. 2017. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penulis: Yogyakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65461>.
- Walikota Yogyakarta. 2022. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Penulis: Yogyakarta. Diakses 12 Juli 2023 dari <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/assets/instansi/dindukcapil/files/rencana-kerja-pemerintah-daerah-tahun-2023-9546.pdf>.
- Wardhana, A., Kharisma, B., dan Noven, S. A. 2020. Dinamika Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 25(01): 22–40.
- Wesnawa, I. G. A., dan Sudirtha, I. G. 2017. Karakteristik Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Berbasis Nilai-Nilai Nyamabraya. *Jurnal Ikatan Keluarga Alumni*, 15(02): 146–156.
- Widiartana, P. W. 2021. Kedudukan dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(01): 124–145.
- Yunus, H. S. 2008. *Dinamika Wilayah Peri Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zhang, H., Zhang, H., dan Zhang, J. 2015. Demographic Age Structure and Economic Development: Evidence from Chinese Provinces. *Journal of Comparative Economics*, 43(2015): 170–185.